

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

Bab II Kajian Konseptual menjelaskan berkaitan dengan penelitian terdahulu, teori yang relevan dengan penelitian yang mencakup tinjauan tentang persepsi, tinjauan tentang pembangunan, tinjauan tentang ibu kota, dan tinjauan tentang perubahan sosial. Berikut penjelasan BAB II Kajian Konseptual:

2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian yang akan dilaksanakan yaitu tentang Persepsi Siswa dan Guru SMKN 5 Samarinda Tentang Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Abdul Jabbar Ridho, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2020 yang berjudul “Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah”. Penelitian ini menggunakan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder serta didukung oleh bahan non hukum yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif Fikih Siyasah dalam aspek masalah terhadap pengambilan keputusan pemindahan ibu kota tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor utama melatarbelakangi pemindahan ibu kota Jakarta, yaitu kepadatan perkotaan,

bencana banjir, ancaman banjir air laut pasang, dan eksploitasi (pengambilan) air tanah secara berlebihan. Sementara itu, ditinjau dari perspektif fikih siyasah, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan dapat dijalankan demi kemaslahatan bangsa. Presiden selaku kepala negara mempunyai hak dan wewenang untuk mengambil kebijakan politik untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam hal pengambilan kebijakan pemindahan ibu kota, demi meraih kemaslahatan bangsa, pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis dalam meraih kemaslahatan pemindahan ibu kota ini dengan berbagai macam jaminan yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat Kalimantan sebagai pribumi ibu kota baru dan menjamin keberlangsungan flora dan fauna Kalimantan serta menjamin keberlangsungan hutan tropis Kalimantan sebagai paru-paru dunia.

2. Penelitian Rizky Putri Utami, Mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018 yang berjudul “Dinamika Kekhususan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perubahan dan perkembangan peraturan tentang Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara, mengetahui tentang filosofi dari aturan hukum mengenai Provinsi DKI Jakarta sejak awal kemerdekaan, hingga reformasi, serta untuk mengetahui pengaruh pemberian otonomi khusus bagi Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kesimpulan penelitian ini, pada dasarnya adalah tentang perkembangan peraturan tentang Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara yang dianalisis

dari perbandingan peraturan yang mengaturnya pada setiap masa/era sejak awal kemerdekaan hingga reformasi, dan pada setiap masanya tentu saja undang-undang tidak selalu berisi perubahan, adapula penambahan atau sekedar penetapan, serta dengan diberikannya otonomi khusus pada Provinsi DKI Jakarta, maka peraturan yang berubah dan berkembang tersebut juga memiliki pengaruh yaitu dengan diberikannya otonomi tunggal, DPRD DKI Jakarta hanya ada tingkat provinsi, pendanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan dalam APBN, dan Gubernur diberikan kekhususan tugas dan hak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta yang kompleks karena kekhususannya sebagai Ibu Kota Negara.

3. Penelitian Dharma Big Queen Bulqis. Mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah tahun 2023 yang berjudul “Persepsi Guru Terhadap Kurikulum Merdeka Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Sekolah Penggerak SMPN 1 Kemang Bogor”. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai persepsi guru terhadap kurikulum merdeka pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti (BP) di Sekolah Penggerak SMPN 1 Kemang Bogor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang mengeksplorasi situasi dan data subjek yang akan di teliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian ini memberi gambaran serta penjelasan mengenai persepsi guru terhadap kurikulum merdeka di SMPN 1 Kemang Bogor. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data

dalam penelitian ini menggunakan teknik reduksi, display dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi guru dan tenaga pendidik di dalam implementasi kurikulum merdeka secara keseluruhan memiliki persepsi yang baik. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan banyaknya ungkapan yang mendukung terhadap penerapan kurikulum merdeka. Persepsi yang baik dan mendukung tersebut tercermin dari kesediaan para guru untuk mengikuti kebijakan terkait konsep kurikulum merdeka, khususnya guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang bahkan merasa terbantu dengan adanya kurikulum merdeka karena kurikulum ini lebih mengedepankan karakter baik peserta didik maupun guru. Dengan demikian, kurikulum ini sejalan dengan penanaman nilai-nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) sehingga dari ketiga guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti (BP) yang ada di SMPN 1 Kemang Bogor, semuanya memiliki pandangan yang sangat baik terhadap penerapan kurikulum merdeka.

4. Penelitian Muhammad Rafdi Aufari. Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum UIN Yogyakarta tahun 2023 yang berjudul “Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Ditinjau Dari Konstitusi dan Perbandingannya Dengan Ibu Kota Negara Malaysia”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kekhususan ibukota nusantara berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 ditinjau dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serta untuk mengetahui perbedaan khusus antara ibu kota nusantara dengan ibu kota negara Malaysia.

Hasil dari penelitian ini adalah, Kekhususan Ibukota Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ditinjau dari konstitusi memiliki potensi bertabrakan. Sebab dalam konstitusi telah dinyatakan secara tegas bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis dimana pemaknaan demokratis tersebut kemudian dipertegas oleh Putusan MK Nomor 072–073/PUU II/2004 dimana kata demokratis tersebut dapat dimaknai dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui perwakilan rakyat yakni DPRD secara tidak langsung. Tetapi pemilihan Otorita IKN /Kepala Daerah Ibu Kota Nusantara ditunjuk secara langsung oleh Presiden yang tidak mencerminkan makna demokratis pemilihan kepala daerah itu sendiri. Sebab penunjukan kepala Otorita IKN oleh presiden telah menghilangkan prinsip otonomi daerah, dan membuat kepala Otorita IKN tidak independen dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala daerah karena bisa diintervensi oleh pemerintah pusat maupun diganti apabila tidak selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.

5. Penelitian Fakkarul Rozin Mudhoffar. Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2023 yang berjudul “Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui respon masyarakat serta pemerintah Penajam Paser Utara mengenai perpindahan ibu kota baru di PPU, serta mengetahui persiapan Pemerintah PPU untuk menghadapi berbagai dampak perpindahan ibu kota. Presiden Jokowi mengumumkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 26 Agustus 2019. IKN

dirancang sebagai representasi kemajuan suatu bangsa dengan mengusung konsep forest city, smart, and green city. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam menentukan hasil penelitian, dengan melakukan pendekatan konseptual dalam mencari data- data penelitian. Secara garis besar pemerintah melihat dari segi makro mengenai kemakmuran pada masyarakat, kesejahteraan bagi masyarakat, dan kehidupan yang lebih baik kedepannya. Namun, masyarakat merinci dari segi sosial, budaya, adat, dan sebagainya. Disini dapat dilihat terdapat gap antara pemerintah dengan masyarakat, utamanya masyarakat lokal.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pemerintah mendukung penuh pembangunan IKN karena pembangunan ini dinilai sebagai upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Pemerintah setempat mengatakan bahwa pemilihan PPU sebagai lokasi IKN karena, kepercayaan pemerintah pusat kepada PPU. Sedangkan, realitanya masyarakat lokal dirugikan dari adanya survey BAPPENAS yang mengakibatkan tanah penduduk diambil alih oleh otorit, hal ini mengakibatkan ancaman konflik agraria nantinya. Kekhawatiran penduduk lokal terhadap bergesernya budaya lokal dan kekhawatiran kurangnya persiapan SDM untuk bersaing dengan pendatang, namun masyarakat tidak mampu menolak pembangunan IKN karena mereka tidak berani melawan otorita. Saat ini masyarakat lebih mengharapkan persiapan dan perencanaan yang matang dari pemerintah, karena IKN pasti akan tetap dibangun.

Matriks 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian Terdahulu dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan kekurangan
1.	Abdul Jabbar	“Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah”. (2020)	Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan	Menunjukkan faktor-faktor latar belakang pemindahan ibu kota Jakarta, seperti kepadatan perkotaan, bencana banjir, ancaman banjir air laut pasang, dan eksploitasi air tanah secara berlebihan. Dari perspektif fikih siyasah, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan dapat dijalankan demi kemaslahatan bangsa.	Perbedaan: Variabel, lokasi penelitian, dan sasaran penelitian. Kekurangan: Kurang detailnya tentang bagaimana aruran hukum dan kebijakan tersebut akan diimplementasikan dan dipantau bisa menjadi masalah dan hasil penelitian tidak memberikan petunjuk yang jelas tentang bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
2.	Dhelta Big Queen Bilqis	“Persepsi Guru Terhadap Kurikulum Merdeka Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Sekolah Penggerak SMPN 1 Kemang Bogor”. (2023)	Deskriptif kualitatif	Menunjukkan bahwa persepsi guru dan tenaga pendidik terhadap implementasi kurikulum merdeka secara keseluruhan memiliki persepsi yang baik.	Perbedaan: Variabel, lokasi penelitian, dan sasaran penelitian. Kekurangan: Perlu dilaksanakan studi teoretik dan studi empirik dengan baik dan benar sehingga dapat menemukan fokus penelitian sesuai konteks fenomena empirik di lapangan dengan paradigma penelitian yang sesuai dengan kebutuhan penelitian di lapangan yaitu paradigma penelitian kualitatif (emik), sehingga dapat menghasilkan rumusan masalah / pertanyaan penelitian yang baik dan benar.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian Terdahulu dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan kekurangan
3.	Rizky Putri Utami	“Dinamika Kekhususan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara”. (2018)	Deskriptif kualitatif	Menggambarkan perubahan dan perkembangan peraturan tentang Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara, serta pengaruh pemberian otonomi khusus bagi Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.	Perbedaan: Variabel, lokasi penelitian, dan sasaran penelitian. Kekurangan: Kurang memberikan analisis yang mendalam terhadap dampak konkret dari pemberian otonomi khusus bagi ibukota DKI Jaskarta terhadap pelayanan publik serta kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
4.	Muhammad Rafdi Aufari	“Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Ditinjau Dari Konstitusi dan Perbandingannya Dengan Ibu Kota Negara Malaysia”. (2023)	Deskriptif Kualitatif	Menganalisis kekhususan ibukota nusantara berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 ditinjau dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta perbedaan khusus antara ibu kota nusantara dengan ibu kota negara Malaysia.	Perbedaan: Variabel, lokasi penelitian, dan sasaran penelitian. Kekurangan: Kurangnya perbandingan yang mendalam dengan ibukota negara Malaysia tentang bagaimana masing-masing negara mengatur urusan ibukota mereka.
5.	Fakkarul Rozin Mudoffar	“Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur.” (2023)	Deskriptif kualitatif	Mengidentifikasi respon masyarakat dan pemerintah Penajam Paser Utara terhadap pemindahan ibu kota, serta persiapan Pemerintah PPU untuk menghadapi dampak perpindahan ibu kota.	Perbedaan: Variabel, lokasi penelitian, dan sasaran penelitian. Kekurangan: Analisis yang lebih mendalam tentang perubahan sikap, kekhawatiran, dan harapan masyarakat serta langkah konkret yang diambil oleh pemerintah PPU dalam menghadapi dampak perpindahan ibu kota negara.

Matriks 2.1 menunjukkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Persepsi Siswa dan Guru SMKN 5 Samarinda Tentang Pembangunan Ibu Kota Nusantara.” memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas. Penelitian yang mengkaji tentang Ibu Kota Nusantara baru sedikit yang melakukannya. Penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas dalam bentuk narasi dan matriks dapat diketahui bahwa tidak ada yang khusus membahas mengenai Persepsi Siswa dan Guru Tentang Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan tergolong masih baru dan belum banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu.

2.2 Tinjauan yang relevan dengan penelitian

2.2.1 Tinjauan Tentang Persepsi

Pengertian persepsi dari kamus psikologi adalah berasal dari bahasa Inggris, *perception* yang artinya: persepsi, penglihatan, tanggapan; adalah proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya; atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi alat indera (Kartono dan Gulo, 1987 dalam Mildayati, 2021: 7). Sedangkan Gibson (dalam Kuntyassari, 2001) mengatakan persepsi adalah proses pemberian arti (kognitif) terhadap lingkungan oleh individu untuk menafsirkan atau memahami dunia sekitarnya.

Walgito (2001 dalam Mildayati, 2021:7) menjelaskan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat

indera. Pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh saraf ke otak melalui pusat susunan saraf dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Stimulus diterima oleh alat indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang di indera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan.

Menurut Rakhmat (2005, dalam Hadi, dkk, 2017) mengungkapkan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sugihartono (2007 dalam Debi, 2021) mengemukakan bahwa persepsi merupakan kemampuan panca indera dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.

Melalui persepsi individu dapat menyadari, dapat mengerti tentang keadaan diri individu yang bersangkutan. Persepsi itu merupakan aktivitas yang *integrated*, maka seluruh apa yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu masyarakat akan ikut berperan dalam persepsi tersebut (Walgito, 2001 dalam Mildayati, 2021:7). Berdasarkan hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa dalam persepsi itu sekalipun stimulusnya sama tetapi karena pengalaman tidak sama, kemampuan berpikir tidak sama, kerangka acuan tidak sama, adanya kemungkinan hasil persepsi antara individu dengan individu yang lain tidak sama.

Maka dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses pemberian arti dari

individu berupa pandangan, gambaran yang dihasilkan dari panca indra kemudian dianalisa, diinterpretasi dan kemudian dievaluasi. Pada hakekatnya persepsi merupakan suatu interelasi dari berbagai komponen, dimana komponen-komponen tersebut menurut Baron dan Byrne, Myers (dalam Haekal, 2016: 186) menyatakan bahwa ada tiga komponen yang membentuk struktur persepsi, yaitu:

1. Komponen Kognitif (komponen perseptual)

Komponen kognitif yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap suatu objek.

2. Komponen Afektif (komponen emosional)

Komponen afektif yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap suatu objek. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negatif.

3. Komponen Konatif (komponen perilaku)

Komponen Konatif yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap suatu objek. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek.

2.2.1.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Restiyanti Prasetijo (2005:69, dalam Hadi, Dkk 2017) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, dapat dikelompokkan menjadi dua faktor utama yaitu:

1. Faktor internal, meliputi:

1) Pengalaman

Pengalaman memiliki dampak besar pada cara kita mempersepsikan hal-hal baru. Pengalaman masa lalu membentuk kerangka kerja mental yang digunakan untuk membandingkan dan menginterpretasikan informasi baru.

2) Kebutuhan

Kebutuhan individu mempengaruhi bagaimana mereka mempersepsikan lingkungan mereka. Individu cenderung lebih peka terhadap informasi yang relevan dengan kebutuhan mereka saat ini, sementara informasi yang tidak relevan cenderung diabaikan atau kurang diperhatikan.

3) Penilaian

Penilaian individu terhadap situasi atau stimulus tertentu juga mempengaruhi persepsi mereka. Penilaian ini dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai, keyakinan, dan preferensi individu.

4) Ekspetasi / pengharapan, dan

Ekspetasi / harapan juga mempengaruhi persepsi. Orang-orang cenderung mempersepsikan informasi yang relevan dengan harapan mereka secara lebih intens daripada informasi yang tidak relevan. Ekspetasi / harapan ini didasarkan pada pengalaman sebelumnya atau harapan-harapan yang individu miliki.

2. Faktor eksternal, meliputi:

1) Tampilan luar

Tampilan luar yang mempengaruhi persepsi terkait dengan penampilan fisik

suatu objek.

2) Sifat-sifat stimulus

Sifat-sifat dari stimulus itu sendiri dapat mempengaruhi persepsi. Misalnya, warna, ukuran, bentuk, dan keunikan stimulus dapat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan sesuatu.

3) Situasi lingkungan

Lingkungan fisik dan sosial di sekitar individu dapat mempengaruhi cara mereka mempersepsikan informasi dan stimulus.

2.2.2 Tinjauan Tentang *Community Development*

PBB (1995, dalam Taufiqurokhman, 2019) mendefinisikan *community development* atau pengembangan masyarakat sebagai suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kemajuan kondisi ekonomi dan sosial bagi seluruh warga masyarakat dengan partisipasi aktif dan sejauh mungkin menumbuhkan prakarsa masyarakat itu sendiri. Sedangkan menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero (2016:409) mengemukakan,

Pengembangan masyarakat adalah membangun kembali masyarakat sebagai tempat pengalaman penting manusia, memenuhi kebutuhan manusia, dan membangun kembali struktur-struktur negara kesejahteraan, ekonomi global, birokrasi, elite profesional, dan sebagainya yang kurang berperikemnausiaan dan sulit diakses (Jim Ife & Frank Tesoriero, 2016, hal. 409).

Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan masyarakat bertumpu pada inisiatif dan partisipasi penuh warga masyarakat, maka penerapan *community development* lebih ditekankan kepada upaya untuk mengembangkan kapasitas warga masyarakat daripada pemecahan masalah demi masalah. Dalam pengembangan masyarakat melibatkan aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan,

ekonomi, dan sosial. Proses ini memungkinkan masyarakat untuk menjadi agen perubahan dalam memajukan kondisi mereka sendiri dan membantu mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, dengan membangun kapasitas masyarakat, pengembangan masyarakat juga membantu dalam penyesuaian terhadap perubahan sosial dan ekonomi serta memanfaatkan peluang pembangunan. Dengan demikian, pengembangan masyarakat adalah bagian integral dari proses perubahan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan.

2.2.2.1 Tinjauan Tentang Pembangunan

Pembangunan merupakan sebuah keharusan di dalam satu wilayah baik itu negara, daerah (Kabupaten atau Kota), bahkan ditingkat pedesaan. Makna pembangunan telah ditafsirkan secara berbeda oleh para ahli yang berbeda. Pembangunan didefinisikan oleh Todaro dan Smith dalam (Felix, Umar, Ade, Muhammad et al. 2022, 32) sebagai proses multidimensi dengan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap demografi dan institusi nasional, serta ekonomi pertumbuhan meliputi mengurangi ketimpangan dan memerangi kemiskinan absolut. Kebanyakan ilmuwan membuat teori tentang tren perkembangan pembangunan, bagaimana mencapainya dan bagaimana mencegahnya.

Paradigma pembangunan nasional Indonesia ialah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya. Yang dimaksud pembangunan manusia Indonesia seutuhnya adalah pembangunan non-fisik dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Sedangkan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya berarti pembangunan baik fisik maupun non-fisik

dilakukan secara merata di seluruh wilayah Republik Indonesia. Akan tetapi, pada kenyataannya pembangunan di Indonesia baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia belum dilakukan secara merata, (Rahman & Novitasari, 2018 dalam Felix, Umar, Ade, Muhammad et al. 2022, 32).

Siagian (1994 dalam Badruddin, 2021) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994 dalam Badruddin, 2021) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.”

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005 dalam Badruddin, 2021).

Menurut Deddy T. Tikson (2005 2005 dalam Badruddin, 2021) bahwa

pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi. Dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan, antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme. Disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dari spiritualisme ke materialisme/sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (*community/group*). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi.

2.2.2.2 Tinjauan Tentang Perubahan Sosial

Perubahan merupakan suatu proses yang terus menerus terjadi dalam setiap masyarakat. Perubahan tersebut berjalan dengan sedemikian rupa sehingga tidak

terasa oleh manusia yang mendukungnya, ini biasa disebut dengan evolusi. Dalam sosiologi terdapat gambaran adanya perubahan evolusi masyarakat dari masyarakat yang masih sederhana menjadi masyarakat yang modern. Proses perubahan tersebut terdapat dalam rentang tujuan ke masyarakat modern.

Menurut Gillin dan Gillin, suatu perubahan sosial itu merupakan variasi dari cara dan gaya hidup yang sudah diterima, baik itu dikarenakan sebuah ideologi, kebudayaan material, berubahnya kondisi geografis, sampai dengan komposisi penduduk, dikarenakan dengan adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam sebuah pengertian tersebut, Gillin dan Gillin lebih tertuju terhadap sebuah dinamika masyarakat dan reaksi mereka pada suatu lingkungan sosialnya, baik itu yang menyangkut cara dan gaya mereka dalam kehidupan, kondisi alam sekitar, budaya mereka, dinamika kependudukan sampai dengan filsafat hidup yang dianut dan yang telah ditemukannya sebuah hal-hal baru dalam kehidupan mereka (Marius, Jelamu Ardu, 2006 dalam Fauzi, 2020).

Perubahan sosial merupakan perubahan kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus dan tidak akan pernah berhenti, karena tidak ada satu masyarakat pun yang berhenti pada suatu titik tertentu sepanjang masa. (Djazifah, 2012: dalam Bambang, 2015) menyatakan perubahan sosial mencakup bermacam-macam perubahan di dalam lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola tingkah laku antar kelompok di dalam masyarakat. Sebuah lembaga sosial, seperti keluarga tidak akan berubah jika tidak terjadi perubahan kebudayaan yang fundamental yang berkaitan dengan

itu.

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dimaknai bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat terutama pada bagian kebudayaan baik secara material ataupun immaterial yang kemudian dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan sosial suatu masyarakat.

1. Bentuk-bentuk Perubahan Sosial

Di dalam kehidupan masyarakat dapat kita jumpai berbagai bentuk perubahan sosial yang dapat digambarkan sebagai berikut :(Henslin, 2007; PB Horton dan CL Hunt, 1992; Soerjono Soekanto, 2000 dalam Nur Djazifah, 2012).

1. Perubahan Sosial secara Lambat

Perubahan sosial secara lambat dikenal dengan istilah evolusi, merupakan perubahan-perubahan yang memerlukan waktu lama, dan rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti. Ciri perubahan secara evolusi ini seakan perubahan itu tidak terjadi di masyarakat, berlangsung secara lambat dan umumnya tidak mengakibatkan disintegrasi kehidupan. Perubahan secara lambat terjadi karena masyarakat berusaha menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Oleh sebab itu perubahan yang terjadi melalui evolusi terjadi dengan sendirinya secara alami, tanpa rencana atau kehendak tertentu.

2. Perubahan Sosial secara Cepat

Perubahan sosial yang berjalan cepat disebut revolusi. Selain terjadi secara cepat, juga menyangkut hal-hal yang mendasar bagi kehidupan masyarakat serta lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan sering menimbulkan disintegrasi

dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

3. Perubahan Sosial Kecil

Perubahan sosial kecil merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung / berarti bagi masyarakat karena tidak berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan dan lembaga kemasyarakatan.

4. Perubahan Sosial Besar

Perubahan sosial besar merupakan perubahan yang dapat membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan serta menimbulkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan seperti yang terjadi pada masyarakat yang mengalami proses modernisasi - industrialisasi.

5. Perubahan Sosial yang Direncanakan (Dikehendaki)

Perubahan Sosial yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang akan mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki perubahan dinamakan Agent of change (agen perubahan), yaitu seseorang atau sekelompok orang yang telah mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dari satu atau lebih lembaga - lembaga kemasyarakatan, serta memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial. Suatu perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan Agent of change tersebut. Cara-cara mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan rekayasa sosial (sosial engineering) atau yang biasa

disebut sebagai perencanaan sosial.

6. Perubahan Sosial yang Tidak Direncanakan (Tidak Dikehendaki)

Perubahan sosial yang tidak direncanakan (tidak dikehendaki) merupakan perubahan yang berlangsung tanpa direncanakan / dikehendaki oleh masyarakat dan di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Konsep perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki tidak mencakup pengertian apakah perubahan-perubahan tadi diharapkan atau tidak diharapkan oleh masyarakat. Karena bisa terjadi, perubahan yang tidak direncanakan/tidak dikehendaki ternyata diharapkan dan diterima oleh masyarakat, seperti reformasi yang terjadi di Indonesia.

2. **Faktor-faktor Penyebab Perubahan Sosial dan Kebudayaan**

Untuk menelusuri penyebab terjadinya perubahan sosial, perlu mencermati fenomena yang cukup kompleks; namun secara umum dibedakan antara penyebab yang bersumber dari dalam (internal) masyarakat itu sendiri dan yang bersumber dari luar (eksternal) masyarakat tersebut, seperti dipaparkan berikut ini: (James M. Henslin, 2007; PB Horton dan CL Hunt, 1992; Soerjono Soekanto, 2000 dalam Nur Djazifah, 2012)

1. Penyebab Perubahan yang Bersumber Dari Dalam (internal) Masyarakat Antara

Lain:

1) Bertambah dan berkurangnya Penduduk

Bertambahnya penduduk yang sangat cepat di pulau Jawa menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, terutama dalam lembaga - lembaga kemasyarakatannya (dalam bentuk aturan / norma sosial). Berkurangnya

penduduk dapat disebabkan karena penduduk berpindah ke daerah lain. Kondisi ini dapat mengakibatkan kekosongan dalam bidang pembagian kerja dan stratifikasi sosial, sehingga memengaruhi lembaga - lembaga kemasyarakatan.

2) Penemuan – penemuan baru

Penemuan-penemuan baru dibedakan dalam pengertian *discovery* dan *invention*. *Discovery* adalah penemuan unsur kebudayaan yang baru, baik berupa alat, ataupun yang berupa gagasan yang diciptakan oleh seorang individu atau serangkaian ciptaan para individu. *Discovery* baru menjadi *invention* apabila masyarakat sudah mengakui, menerima serta menerapkan / menggunakan penemuan baru tersebut; misalnya dalam proses penemuan mobil. Rangkaian proses penemuan, pengembangan dan persebaran suatu hasil kebudayaan baru tersebut, serta cara-cara unsur kebudayaan baru tadi diterima, dipelajari dan akhirnya dipakai dalam masyarakat, dinamakan sebagai *innovation* (inovasi).

3) Pertentangan (*Conflict*)

Pertentangan yang terjadi antara individu dengan kelompok maupun antara kelompok dengan kelompok dapat menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial masyarakatnya. Seperti yang sering terjadi pada masyarakat yang tengah mengalami pergeseran dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, pertentangan terjadi antara kelompok generasi tua dengan kelompok generasi muda yang lebih cepat menerima unsur-unsur kebudayaan modern.

4) Terjadinya Pemberontakan atau Revolusi

Terjadinya pemberontakan atau Revolusi dalam suatu pemerintahan

negara akan menyebabkan terjadinya perubahan – perubahan besar dalam kehidupan negara tersebut. Seluruh lembaga kemasyarakatan, mulai dari bentuk negara sampai keluarga batih mengalami perubahan-perubahan yang mendasar.

2. Penyebab perubahan yang bersumber dari luar (Eksternal) masyarakat

1) Lingkungan Alam Fisik

Perubahan yang disebabkan oleh lingkungan alam fisik dapat berupa bencana alam seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi, angin taufan dan sebagainya, maupun berupa tindakan manusia yang tidak terkontrol sehingga merusak lingkungan, seperti penebangan hutan secara liar yang menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor. Kondisi ini mengakibatkan penduduk harus pindah ke daerah yang lebih aman dan berbeda dengan kondisi lingkungan yang lama. Untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan di daerah yang baru, maka berkembanglah lembaga - lembaga kemasyarakatan baru untuk menjaga agar kehidupan masyarakat tetap dapat berjalan.

2) Peperangan

Terjadinya peperangan antar negara dapat mengakibatkan perubahan bagi negara yang mengalami kekalahan, karena negara yang kalah akan menjadi negara terjajah dan harus mengikuti pola kehidupan politik baru sesuai dengan kehendak negara yang memenangkan peperangan tersebut. Karena negara yang menang biasanya akan memaksakan kehendaknya pada negara yang kalah.

3) Pengaruh Kebudayaan Masyarakat lain

Masuknya pengaruh kebudayaan masyarakat lain bisa terjadi karena adanya hubungan fisik antara dua masyarakat, yang diikuti adanya pengaruh timbal

balik sehingga masing - masing masyarakat akan mengalami perubahan.

2.2.3 Tinjauan Tentang Ibu Kota Negara

Bila ditinjau dari tata bahasa, ibu kota yang dalam bahasa Inggris dikatakan sebagai *capital city* berasal dari bahasa latin yaitu *caput* yang berarti kepala. Lazimnya, Ibu kota merupakan pusat pemerintahan, pusat bisnis dan pusat kekuasaan dan kebijakan suatu negara. Untuk di Indonesia, pengertian mengenai Ibu kota tidak terlalu dijelaskan secara rinci di dalam peraturan perundang-undangan. Namun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa Ibu kota adalah tempat kedudukan pusat, pemerintahan suatu negara, tempat dihimpun unsur administratif (eksekutif, legislatif, dan yudikatif); kota yang menjadi pusat pemerintahan.

Ibu kota merupakan sebuah kota yang dirancang sebagai pusat pemerintahan suatu negara, secara fisik ibu kota negara umumnya difungsikan sebagai pusat perkantoran dan tempat berkumpul para pimpinan pemerintahan (Yahya, 2018 dalam Diani 2019). Ibu kota negara atau *capital city* atau *political capital*, berasal dari bahasa latin *caput* yang berarti kepala (*head*), dan terkait dengan kata *capitol* yang terkait dengan bangunan dimana pusat pemerintahan utama dilakukan.

Bartolini mengatakan bahwa ibu kota negara merupakan komponen yang signifikan menggambarkan identitas nasional, sebagai lokasi kekuasaan suatu negara atau merepresentasikan besarnya kuasa suatu negara, dan juga sebagai titik fokus dari keberadaan kelompok pendukung, konflik serta kohesi antar kelompok yang membentuk suatu negara/bangsa.

2.2.4 Tinjauan Tentang Pekerjaan Sosial dengan Pendidikan

2.2.4.1 Pekerja Sosial di Bidang Pendidikan

Pekerja sosial merupakan sebuah profesi yang berkaitan dengan membantu individu atau seseorang, keluarga, kelompok, dan komunitas tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan kelompok (Sosial, 2019). Dengan tujuan untuk membantu manusia dalam mengembangkan keterampilan serta kemampuan mereka untuk dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki dan masyarakat.

Pekerja sosial merupakan sebuah bidang yang luas dan banyak ragamnya, terdapat berbagai karier di dalamnya yang hampir tak terbatas. Pekerja sosial bekerja dalam berbagai pengaturan, termasuk pada rumah sakit, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kesehatan mental, sekolah, kantor pemerintahan, lembaga advokasi, lembaga, dan organisasi masyarakat.

Pekerja sosial berusaha mungkin untuk beradaptasi dengan misi sekolah untuk menyediakan sebuah layanan sosial dengan menerapkan kompetensi dan kepercayaan diri. Maka dari itu pekerja sosial membutuhkan kompetensi yang tinggi untuk menangani tugas mereka dalam intervensi. Hal ini dapat menangani siswa dalam permasalahan mental, emosional, perilaku, dan pembelajaran akademik siswa, sehingga pekerja sosial perlu meningkatkan kemampuan diri mereka (Hepwort dkk., 2016) dalam (Sosial, 2019).

Pekerja sosial dalam bidang pendidikan sangatlah penting bagi komunitas sekolah, karena siswa dapat diberikan intervensi untuk dapat menangani masalah kehidupan sosial mereka sendiri. Contoh kasusnya adalah siswa yang memiliki

masalah dengan keluarga sehingga perlu penanganan, masalah kesehatan mental pada siswa, siswa kurang mampu mengontrol emosinya, siswa tidak bisa mengelola waktunya karena kegiatan sekolah yang padat, kurangnya sumber daya (sandang, pangan, dan papan), adanya trauma, cacat perkembangan, dan penyakit fisik.

Maka dari itu pekerja sosial hadir dalam pekerja sosial bidang pendidikan, terdapat banyak peran pekerja sosial seperti mediator, enabler, dan pelatih nilai sosial (Warner, 2015). Dalam peraturan sekolah terdapat peran pekerja sosial secara lebih spesifik yaitu sebagai berikut:

1. Peran Petugas Pengawas Pelajar yang Bolos

Dimana siswa sering membolos pada sistem sekolah sangat besar, kemungkinan kasus bolos pada siswa lebih banyak dibandingkan dengan sistem sekolah yang lebih kecil.

2. Peran Advokat

Peran advokat pekerja sosial dalam bidang pendidikan merupakan memberikan sebagai perlindungan dan pertahanan pada hak-hak siswa yang melakukan pelanggaran agar dapat memperoleh kembali hak-hak mereka.

3. Orang Tua-Guru

Pekerja sosial sebagai penghubung antar orang tua dan guru, untuk mencegah adanya perdebatan dan perselisihan serta sebagai penengah antara orang tua murid dan guru.

4. Konsultasi (*Conferee*)

Pekerja sosial dalam bidang pendidikan berperan dalam melakukan pengadaan pertemuan untuk mendiskusikan kasus pada siswa (konferensi siswa).

Pertemuan ini membahas kasus-kasus yang melibatkan profesional lain seperti guru, wali kelas, pejabat BP, dan pemimpin sekolah, serta dapat juga melibatkan orang tua. Sebagai pekerja sosial yang memiliki peran ini harus bertindak sebagai conferee, yang dapat memimpin dan mengarahkan pertemuan tersebut.

5. Mediator (Penengah)

Peran pekerja sosial dalam bidang pendidikan dapat berperan sebagai mediator, dimana pekerja sosial harus menghadapi situasi yang dapat menuntut kenetralan atau ketidak berpihakan. Pekerja sosial dapat memediasi hubungan antara kedua pihak yang mengalami perpisahan, keretakan, atau kerusakan, karena adanya perbedaan persepsi, dan kepentingan.

6. Perantara (*Broker*)

Peran pekerja sosial dalam bidang pendidikan dapat berperan sebagai broker atau perantara, dimana pekerja sosial dapat menghubungkan sumberdaya klien atau siswa yang menyediakan pelayanan penting.

7. Terapis (Konselor)

Peran pekerja sosial dalam bidang pendidikan dapat berperan sebagai konselor atau bisa disebut sebagai terapis, yang merupakan perannya dimainkan oleh profesi lain. Sehingga pekerja sosial perlu mengetahui batas-batas peran konselor dalam mengembangkan peran tertentu. Terdapat kecenderungan tertentu untuk melihat pekerja sosial sebagai terapis konselor. Konselor melakukan konseling sedangkan terapis melakukan psikoterapi.

8. Anggota Tim

Peran pekerja sosial dalam bidang pendidikan selanjutnya yaitu pekerja sosial dapat menggunakan peran pekerja sosial dan profesional lainnya seperti psikolog, terapis, guru pendidikan khusus, guru pendidikan reguler, atau guru pendidikan jasmani). Hal tersebut dapat membantu untuk menentukan kebutuhan khusus dan kebutuhan anak-anak (peserta didik) yang lebih spesifik.

9. Konsultan Kesehatan Mental

Dimana pekerja sosial sekolah yang memiliki pengalaman dalam pelatihan di bidang psikologi dan perilaku sosial individu yang dapat bertindak sebagai konsultan untuk hubungan antar individu, sebagai bagian dari kurikulum pada aspek gaya mengajar.

10. Spesialis Perilaku

Dimana mereka yang memahami dan secara sistematis dapat menerapkan prinsip-prinsip perilaku, terutama pada modifikasi tingkah laku. Pengetahuan tentang bagaimana mengubah perilaku yang dapat diterapkan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

2.2.4.2 Pengertian Pekerjaan Sosial Sekolah

Pekerja sosial sekolah adalah salah satu bidang praktek pekerjaan sosial, yang antara lain memberikan pelayanan konseling penyesuaian diri di sekolah (*school adjustment counseling*), tes kemampuan pendidikan (*educational testing*), konseling keluarga (*family counseling*) dan pengelolaan perilaku (*behavior management*). Pekerja sosial sekolah juga merespon perwujudan hak-hak semua anak untuk mendapatkan pendidikan termasuk bagi anak-anak yang memiliki

kebutuhan khusus serta keluarganya (Rustanto, 2013, dalam Harjanto, 2018).

Pekerjaan sosial adalah aktivitas pertolongan untuk menolong individu-individu, kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang mendukung bagi pencapaian tujuan mereka (Zastrow, 2014, dalam harjanto, 2018). Dengan demikian, tugas yang mendasar dari profesi ini adalah untuk menolong orang menemukan kebutuhan serta melaksanakan tanggungjawabnya sepanjang kehidupan mereka atau pekerjaan sosial menolong orang untuk meningkatkan keberfungsian mereka.

2.2.4.2 Pelayanan Pekerja Sosial Sekolah

Pekerja sosial sekolah memainkan peranan penting dalam hubungan kapasitas antara sekolah dan agensi-agensi sosial masyarakat yang lain yang menolong sekolah dan sumber-sumber lainnya satu sama lain bermanfaat terhadap yang lainnya. Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab pekerja sosial di sekolah, menurut Costin (1972. Hlm. 351, dalam Raharjo, 2015):

1. Pekerja sosial harus mempermudah persyaratan bagi pendidikan langsung dan pelayanan sosial terhadap para siswa serta menyediakan pelayanan sosial langsung terhadap para siswa terpilih.
2. Pekerja sosial harus bertindak sebagai pengacara siswa, berfokus pada kebutuhan-kebutuhan yang penting dari kelompok siswa terpilih.
3. Pekerja sosial harus berkonsultasi dengan para administrator sekolah agar bersama-sama mengidentifikasi situasi permasalahan atau permasalahan yang kompleks yang mana pendekatan pelayanan direncanakan akan dituju, bantuan

dalam mengembangkan hubungan kerjasama dengan agen-agen kemasyarakatan, dan membantu dalam merumuskan kebijakan sekolah yang secara langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan anak dan generasi muda.

4. Pekerja sosial harus berkonsultasi dengan para guru tentang teknik-teknik untuk menciptakan iklim di mana anak-anak mereka bebas dan termotivasi untuk belajar. (Sebagai contoh, melalui penafsiran sosial dan pengaruh budaya dan kehidupan siswa, memfasilitasi penggunaan teman sebaya untuk menolong anak yang bermasalah, atau membantu dalam aspek lainnya dari seni mengatur hubungan di dalam kelas).
5. Pekerja sosial harus mengorganisir orang tua dan kelompok masyarakat untuk saluran perhatian yang efektif tentang siswa dan sekolah serta bertindak sebagai seorang pembangun kekuatan di dalam hubungan dengan sekolah dan masyarakat.
6. Pekerja sosial harus mengembangkan dan menjaga hubungan yang produktif antara sekolah dan wilayah kritis pekerjaan sosial serta praktek legal supaya memudahkan efektivitas pelayanan masyarakat untuk sekolah anak dan keluarga mereka, membantu dengan perubahan yang direncanakan dalam pola organisasi dari program-program, dan sumber-sumber kesejahteraan sosial, dan bertindak sebagai katalis terhadap agen tersebut dalam masyarakat yang merupakan fungsi utama adalah perubahan pola dari struktur sosial kemasyarakatan (contohnya, kesejahteraan anak, perbaikan kesehatan mental masyarakat, dan pelayanan legal untuk kemiskinan).
7. Akhirnya, pekerja sosial harus menetapkan kepemimpinan dalam koordinasi

keahlian multi disiplin ilmu atas nama siswa antara tenaga pelayanan siswa (contohnya, konselor bimbingan, psikolog, perawat, dan petugas pelayanan).

2.2.4.3 Metode Pekerjaan Sosial Sekolah

Adapun dalam pelaksanaan metode intervensi pekerjaan sosial yang dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu:

1. Intervensi mikro adalah keahlian pekerja sosial untuk mengatasi masalah yang dihadapi individu. Masalah sosial yang ditangani umumnya berkenaan dengan problem psikologis, seperti stress dan depresi, hambatan dengan relasi, penyesuaian diri, kurang percaya diri, keterasingan. Metode yang diterapkan dalam setting ini adalah terapi perseorangan (*casework*).
2. Intervensi mezzo dalam hal ini keahlian pekerja sosial adalah untuk mengatasi masalah yang dihadapi kelompok. Metode utama yang dilakukan adalah terapi groupwork yang didalamnya melibatkan berbagai teknik pemberian bantuan seperti *self help group*, dan lainnya.
3. Intervensi makro adalah keahlian untuk mengatasi masalah yang dihadapi komunitas, masyarakat, lingkungannya (sistem sosialnya). (Edi Suharto. 2009)

Dalam menjalankan peranya, pekerja sosial memiliki 3 metode yang dilakukan. Pertama adalah pada tingkat mikro, yaitu yang menangani masalah individu, kedua adalah pada tingkat mezzo yang menangani masalah-masalah yang dihadapi sekelompok siswa, dan yang terakhir adalah tingkat makro, pekerja sosial yang menangani masalah yang dialami dalam komunitas.